

		Nomor SOP	:	04-a /PEMDES/DPMD/2018
		Tanggal Pembuatan	:	03 Januari 2018
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Efektif	:	Januari 2018
		Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARIMUN
Dasar Hukum :				
1	Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);			
2.	Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), Yang Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten	Nama SOP	:	Pengusulan Pencairan Alokasi Dana Dana Desa Dari Anggaran APBD / APB Bagi Desa Se - Kabupaten Karimun.



H. SUWEDI, S.Sos. M.Si
NIP. 19651129 198602 1002

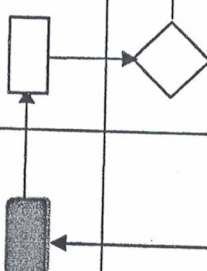
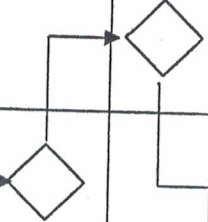
	Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);	
3	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)	Kualifikasi Pelaksanaan
4	Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)	1. Mengetahui Tugas Dan Fungsi Fasilitas ADD / DD 2. Mengetahui Tugas Dan Fungsi Jabatan 3. Mengetahui Penggunaan Perangkat Komputer 4. Mengetahui Aturan Dan Regulasi ADD / DD Baik Yang Bersi Dari APBD Dan APBN
5	Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)	
6	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	
7	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)	

8	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
10	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
11	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)

12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
14	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
15	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
16	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1934)
17	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa
18	Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5)
19	Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pedoman System Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2012 Nomor 17)

20	Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 36)	
21	Peraturan Bupati Karimun Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 5)	
22	Peraturan Bupati Karimun Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang Bersumber dari Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 4)	
23	Peraturan Bupati Karimun Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa (DD) yang Bersumber dari Pendapatan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 5)	
24	Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 38)	
25	Peraturan Bupati Karimun Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 67)	
26	Peraturan Bupati Karimun Nomor 67 Tahun 2017 Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 68)	

27	Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 69)	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan :
1.	SOP Pencairan BPKAD Kabupaten Karimun	1. Lembaran Kerja Berupa Berkas Usulan ADD / DD Dari Desa 2. Ruangan Rapat Internal; 3. Komputer, Printer, LCD, ATK; 4. Jaingan Internet;
2.	SOP Pembinaan Dan Pengawasan Inspektorat Daerah	
Peringatan		Pencatat Dan Pendapatan
Apabila Penanganan Dan Fasilitas Usulan ADD / DD Terlambat, Maka Semua Aktifitas Desa Akan Mengalami Keterlambatan, Kinerja Desa Menurun		- Disimpan Sebagai Dokumen ADD/DD - Dilanjutkan Ke Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Karimu

No	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		PEMOHON	PANITIA	TIM FASILITASI/VERIFIKASI	SEKDA	BPKAD	BUPATI	BANK	KELENGKAPAN DAN PERALATAN	WAKTU	OUT PUT	KEY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terima berkas usulan, dicatat oleh staf								- Berkas usulan ADD & DD - Buku Agenda - Penerimaan berkas Usulan - Pena		Berkas Usulan ADD & DD yang di terima	
2	Memeriksa kelengkapan berkas diserahkan ke Tim Fasilitasi untuk diverifikasi								- Peraturan dan Pedoman ADD & DD		Berkas usulan ADD & DD yang lengkap dan belum lengkap	
3	Verifikasi oleh Tim Verifikasi								- Peraturan dan Pedoman ADD & DD		Berkas usulan DD & ADD yang layak dan tidak layak	
4	Berkas yang belum layak memenuhi syarat, diinformasikan ke desa, berkas yang memenuhi syarat langsung diproses								- Catatan Kekurangan berkas - HP untuk menghubungi desa		Desa adapat mengetahui kekurangan yang perlu dilengkapi	Apabila d yang bersangk bias di hubun
5	Berkas yang layak memenuhi syarat diketik kwitansinya								- Komputer - Kertas		Kwitansi besaran ADD & DD yang akan dicairkan	
6	Mengetik nota dinas pencairab ADD & DD								- Komputer - Kertas		Nota dinas pencairan ADD & DD	
7	berkas usulan Langsung di Verifikasi tim untuk ditandatangani								- Berkas Usulan		berkas usulan ADD & DD yang telah ditanda tangani tim Verifikasi	Apabila pejabat ya bersangu ada di tem

8	Nota dinas ditanda tangani ketua Tim Fasilitasi Kabupaten									- Nota Dinas - Berkas Usulan	Nota dinas dan berkas usulan ADD & DD yang telah di paraf sekda	Apat pejabat bersang ada di t
9	Nota dinas yang sudah di tangani ketua Tim. Fasilitasi Kabupaten Dibawa ke Sekda untuk intruksi pencairan									- Nota Dinas	Nota dinas disertai dengan intruksi pencairan oleh sekda	Apat pejabat bersang ada di t
10	Nota dinas dan berkas diserahkan ke BPKAD Kab. Karimun									- Nota Dinas - Berkas Usulan	Nota dinas dan berkas usulan diperiksa oleh BPKAD	
											Pencairan	

KETERANGAN SIMBOL

Nama Simbol	Kapsul / Terminator	Kotak / Proses	Belah Ketupat / Decision	Panah / Arrow	Segi Lima / Off Page Co
Sombol					
Makna	Mulai / Berakhir	Proses / Eksekusi	Pengambilan Keputusan	Arah Proses	Hubungan Antar symb berbeda halama
Kebijakan					
Y- Ya			T- Tidak		